

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku

- A Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2012. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arlina Permanasari dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Commitee Of The Red Cross.
- Boer Mauna. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam EraDinamika Global*. Bandung: PT. Alumni
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Denny Ramdhani, Heribertus Jaya Triyana Sefriyani, Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2015. *Konteks dan perspektif politik terkait hukum humaniter internasional kontenporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf. 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- I Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nils Melzer. 2016. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction* (Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif). Diterjemahkan oleh Etienne Kuster. Penerbit International Committe of the Red Cross. Jakarta. 2019.
- Philipus M. Hadjon. 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).

Soleman B. Ponto. 2014. *Jangan Lepas Papua (mencermati pelaksanaan operasi militer di Papua)*. Rayyana Komunikasindo.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

II. Karya Ilmiah

Adelsa Murena. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional: Kekerasan Kelompok Boko Haram Di Nigeria*. Padang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Adinda Annisa Madani. 2018. *Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Adwani. 2012. *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1.

Anggie Sere Sitompul. 2014, "*Perlindungan Warga Sipil sebagai Korban Penyanderaan dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*". Skripsi Universitas Sumatra Utara.

Ardi Johan Kusuma, dkk. 2021. *Perubahan status organisasi Papua merdeka (OPM) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia : Sebuah Analisis Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Of Government, Vol. 7, No. 1, July-Desember 2021.

Aryojati Ardiwandanto. 2022. *Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua*. Vol. XIV, No.14/II/Puslit/Juli/2022.

Boy Anugerah. 2019. *Papua: Menguarai Konflik Dan Merumuskan Solusi*, Jurnal Kajian Lemhanas. Vol.7 No.4.

Georgy Mishael. Joko Setiyono. Soekotjo Hardiwinoto. 2016. *Kebijakan Operasi Militer Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 2.

Isplancius Ismail. *Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. No. 3 September 2013.

Jean Marie Henckaerts. *Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertip hukum dalam konflik bersenjata*. *International Review of the Red Cross*. Vol.87, No.587, Maret 2005.

Kushartoyo Budisantosa. *Studi Komparatif Konflik Bersenjata Non-Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Hukum Humaniter dan Ham, Vol.2, No.1 November 2020.

- M. Fathoni Hakim. 2010. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka: Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984*, Tesis Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Nugroho Sugiyanto, 2017, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*, Skripsi Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar.
- Nainggolan. P. P, 2014, *Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua*. Jurnal Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI , Vol. 19 .No. 3.
- Naufal Yudawan. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Volume 28, Nomor 8, Bulan Januari, Tahun 2022.
- Sarah Nuraini Siregar. 2010. *Alternatif Model Pengelolaan Keamanan Di Daerah Konflik*. Jurnal Penelitian Politik, vol. 7 no. 1.
- Sulaiman. 2000. *Hukum dan Pembangunan, Sengketa Bersenjata Non Internasional*. Jurnal Hukum No. 1
- Zunnuraeni. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Berkaitan Dengan Konflik Bersenjata Non-Internasional Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2.

III. Internet

- Adi Briantika. 2022. *OPM : Warga Sipil di Wilayah Perang Berarti Bagian dari TNI-Polri*. Tirto.id (4 Maret 2022), diakses pada 19 Juni 2022 pukul 01.41 WIB.
- Adminyl. 2019. *Peranan Polri dalam Konflik Separatis*. Tribratanews.kepri.polri.go.id (13 Agustus 2019), diakses pada 01 September 2022 pada pukul 23.00 WIB.
- Anonym.<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28048/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses 21 Maret 2022 pukul 06.33 WIB.
- Bima Ari Putri Wijata. 2013. *Insurgency and Belligerency*, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengaturan-hukum-internasional-mengenai.html>. Diakses 23 Maret 2022 Pukul 13.33 WIB.
- CNN Indonesia. 2021. *OPM Tetapkan Wilayah Perang dengan TNI/POLRI di Ilaga Puncak*, cnnindonesia.com (27 Mei 2021), diakses pada 19 Juni 2022 pukul 01.36 WIB.

- Devira Prastiwi. *7 Fakta Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Trans Papua*. <https://www.google.co.id/m.liputan6.com>. Diakses 30 September 2021, pukul 02.42 WIB.
- Dhias Suwandi. "*KKB Berulah Sebanyak 92 Kali di Papua Selama 2021, Korban Jiwa 33 Orang*", *Kompas.com*, diakses 21 maret 2022, pukul 05.02 WIB.
- Egy Adyatama. *Konflik Senjata di Papua Belum Tuntas, Ini 7 Kasus Besarnya*. <https://nasional.tempo.co/amp/1433982/konflik-senjata-di-Papua-belum-tuntas-ini-7-kasus-besarnya>. Diakses pada 2 Maret 2022, pukul 01.00 WIB
- Elba Damhuri. 2018. *Mendefenisikan OPM dan KKB*. Republika. Co.id (06 Desember 2018). Diakses pada tanggal 01 September 2022 pukul 21.00 WIB.
- Free Papua Movement (OPM)*". Fas.org. diakses di www.wikipedia.org pada tanggal 21 Maret pukul 14.30 WIB
- <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>. Diakses 10 Oktober 2021, Pukul 05.33 WIB.
- http://eprints.undip.ac.id/75256/3/BAB_II.pdf, diakses 12 Oktober 2021, pukul 03:07 WIB
- <https://repository.upnvj.ac.id/590/3/BAB%20I.pdf>, diakses 12 Oktober 2021, pukul 17.31 WIB
- ICRC. *Internal conflicts or other situations of violence-what is the difference for victims?*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>. Diakses 30 September 2021, Pukul 13.20 WIB.
- KBBI. [Www. Kamus Besar Bahasa Indonesia.com](http://www.kamus-bahasa-indonesia.com). Diakses 12 Oktober 2021, pukul 04.17 WIB.
- Liputan6. *Kasus Penembakan, OPM Nyatakan Bertanggung Jawab*. Liputan6.com (05 Agustus 2011), diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 01.10 WIB.
- Musa Abubar. 2016. *Kelompok kriminal bersenjata kuasai tiga kabupaten "Segitiga Hitam" Papua*, *Antarane.ws.com* (17 Maret 2016).
- Pande Putu Swarsih Wulandari. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Bagian Hukum Internasional, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/5363/4112>.diakses tanggal 10 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB.

Populasi penduduk Indonesia pada tahun 2012 berdasarkan provinsi <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>. Di akses 5 November 2021, pukul 18.09 WIB

Pusat Penelitian Politik LIPI. 2011. *Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua Penyelesaian Hanya dengan Dialog, Tak Bisa dengan Intervensi Kekerasan*. <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-Papua/547-riset-lipi-empat-akar-masalah-konflik-Papua-penyelesaian-hanya-dengan-dialog-tak-bisa-dengan-intervensikekerasan.html>. Diakses 28 Oktober 2021 pukul 02.00 WIB.

Putri Cahyanti. 2017. *Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan*, *Journal of International Relations*. Volume 3. Nomor 4.

Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diakses 12 Oktober 2021, Pukul 12.30 WIB.

Rany Purnama Hadi, S.IP. *tantangan keamann nasional dalam menyikapi transformasi separatisme dan cyberprotest di Papua*, universitas airlangga, repository.unair.ac.id, diakses pada 23 Maret 2022, Pukul 22.47 WIB.

Reza Kurnia Darmawan. *Konflik Bersenjata di Papua, Pengamat Sebut Pemerintah Perlu Melakukan Pendekatan Berbeda*. Kompas.com (25 Maret 2022), diakses pada 01 September 2022 pada pukul 20.25 WIB.

Ryan Virgiawan, 2019, *Terungkap! Inilah Daftar 17 Nama Jenderal OPM yang Wajib Dibasmi TNI-Polri*, Minews.id (15 Agustus 2019).

Singh, Bilveer (2008). *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood* . [Transaction Publishers](https://www.transactionpublishers.com/). hlmn. 61–64 dikutip di [www.wikipedia .org](http://www.wikipedia.org) pada tanggal 21 Maret pukul 14.00 WIB

Suara Papua. 2015. Pepera 1969 adalah sejarah palsu dan cacat hukum. SuaraPapua.com (3 Maret 2015) diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

Tangguh Chairil, Wendsney A.Saidi. *Konflik Papua : Pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan humanis*. <https://ir.binus.ac.id/files/2020/10/Konflik-Papua-fin.-1.pdf>. Diakses 28 oktober 2021, pukul 01.53 WIB.

Tim Merdeka, 2018, *Terungkap, ini deretan persenjataan yang dimiliki kelompok bersenjata Papua*, Merdeka.com (7 November 2018).

Verelladevanka Adryamarthanino. 2022. *Sejarah Munculnya KKB Papua*. Kompas.com (17 Maret 2022). Diakses pada tanggal 01 September 2022 pada pukul 22.20 WIB.

Very. <https://indonews.id/mobile/artikel/26367/Penegasan-OPM-Sebagai-Kelompok-Pemberontak/>. Diakses 14 Oktober 2021, pukul 23.14 WIB.

["Violence and Political Impasse in Papua" \(PDF\) 10 \(10\). Human Rights Watch](#). July 2001. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 14.30 WIB

Wikipedia.org.*warga sipil*. Diakses 10 September 2021, pukul 14.30 WIB.

IV. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi-Konvensi

Konvensi Den Haag Tahun 1907.

Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Hukum Kebiasaan Internasional.

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

